

UPAYA MENCETAK PEMIMPIN YANG *PRIMUS INTER PARES* DI ERA DEMOKRASI CACAT (*FLAWED DEMOCRACY*)

Oleh :

Evsawulan Suri*, Harry Yanza, M Rafi Ariansyah

Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Kota
Bengkulu, Indonesia

*Koresponden: evsawulansuri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk formulasi atau langkah-langkah mencetak pemimpin yang *primus inter pares* di tengah kondisi demokrasi cacat (*Flawed Democracy*) dan mengetahui faktor faktor apa sajakah yang menghalangi lahirnya pemimpin yang *primus inter pares* dari proses demokrasi electoral. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan study kasus (*Case Study*). Dalam menentukan informan pada penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu menggunakan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumentasi mengecek keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitiannya adalah formulasi atau langkah-langkah mencetak pemimpin yang *primus inter pares* di tengah kondisi demokrasi cacat (*Flawed Democracy*) dan Faktor Faktor yang menghalangi lahirnya pemimpin yang *primus inter pares* dari proses demokrasi electoral dirumuskan aspek kajian dan permasalahan dalam mewujudkan calon pemimpin yang berkualitas yaitu pemasalahan parpol, oligarki, korupsi dan rasionalitas masyarakat. Dalam aspek parpol, partai yang baik untuk kepentingan masyarakat disebut dengan Good Political Party Governance mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, yang paham akan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan masyarakat.

Kata Kunci : *Pemimpin, Primus Inter Pares, Demokrasi Cacat*

ABSTRACT

This study aims to formulate or steps to produce a primus inter pares leader in the midst of a flawed democracy and to find out what factors hinder the birth of a primus inter pares leader from the electoral democracy process. The research method used is a descriptive qualitative research method through a case study approach. In determining the informants in the study, the researcher used a purposive technique. The data collection technique chosen was using observation, interviews, Focus Group Discussions (FGD), documentation checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of the study are the formulation or steps to produce a primus inter pares leader in the midst of a flawed democracy and the factors that hinder the birth of a primus inter pares leader from the electoral democracy process are formulated aspects of the study and problems in realizing quality leader candidates, namely the problems of political parties, oligarchy, corruption and the rationality of society. In the aspect of political parties, a good party for the interests of society is called Good Political Party Governance which is able to provide a clear path for future leaders, who understand the values of democracy, integrity, and public service.

Keywords: *Leader, Primus Inter Pares, Flawed Democracy*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia belum dikatakan sukses sebagai negara demokrasi. Dalam negara demokrasi ada tiga aspek yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yakni sektor pendidikan, ekonomi, dan budaya. Sebagai negara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, negara gagal mensejahterakan rakyatnya, bahkan semakin memiskinkan masyarakat miskin (*extreme poverty*). Korelasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi bak jantung dan oksigen, saling mensuplai untuk membuat organ lainnya tetap hidup dan berjalan.

Demokrasi harus mampu mereduksi kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) melalui demokrasi electoral yang sehat dan sukses yang outputnya menghasilkan pemimpin yang paling unggul. Pemimpin pada sebuah demokrasi haruslah pemimpin yang *Primus Inter Pares*, muncul tanpa diskriminasi, memiliki konsep dan kualitas kepribadian yang mengedepankan kepentingan publik. Semakin banyak mencetak pemimpin *primus inter pares*, maka rakyat atau kepentingan publik lah yang diuntungkan karena dapat memberi kemajuan sebuah daerah dan bangsa.

Dalam KBBI *primus inter pares* adalah “yang pertama” (unggul, terbaik) di antara sesama politik. Dalam bahasa Inggris “*first among equals*” atau diartikan secara bebas menjadi yang terbaik dari antara yang terbaik. Prinsip *Primus Inter Pares* adalah pertama yang sederat, atau seorang pemimpin yang mendapat kepercayaan penuh dan berwibawa. *Primus inter pares*

merujuk pada kewibawaan seseorang yang mencakup kepercayaan, mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, pemahaman terhadap permasalahan di dalam suku, keadilan, pandai mendengar, pemecah masalah dan pandai mempersatukan (Saputro LA, Anwar AS, 2023)

Banyak penelitian mengedepankan metode, analisis dan strategi dalam pengentasan kemiskinan namun mengabaikan faktor pemimpin sebagai peran sentral. Bagaimana model, strategi, formulasi aturan kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik apabila *creatornya* tidak berkompeten dan didominasi para oligarki yang *rakus*. Saat ini kualitas demokrasi Indonesia mengalami degradasi.

Dilansir dari laman hukumonline.id, degradasi demokrasi ini ditengarai pemilik modal besar korporasi dan oligarki yang mengintervensi langkah politik di lingkungan eksekutif dan legislative seperti monopoli sarana pemaksaan dan hak kuasa. Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan segelintir orang, tetapi berpengaruh dominan dalam pemerintahan. Oligarki menjadikan negara sebagai alat kepentingan dan partai politik sebagai pintu masuk utama. Oligarki melakukan legitimasi kekuasaan melalui kandidat elektoral sebagai pejabat publik (Koho, 2021).

Oligarki memanipulasi kebijakan publik tertentu, merumuskan ulang konstitusi, batasan otoritas eksekutif, mengkodifikasi hak individu dan kewajiban politik. Oligarki berfungsi sebagai perangkat koordinasi untuk

elit yang membantu diktator mendapatkan kekuasaan (Regilme Jr, 2023).

Data BPS menunjukkan Provinsi Bengkulu memiliki tingkat persentase kemiskinan sebesar 14,62%, berada di posisi ketujuh dalam daftar provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia (kopmas.com). Padahal Bengkulu memiliki potensi kekayaan yang sangat melimpah yang sesungguhnya tidak layak masuk kategori provinsi yang miskin.

Beberapa potensi kekayaan berupa potensi kemaritiman, pariwisata budaya, sejarah dan alam, sektor perkebunan seperti sawit, kopi, karet dan pertambangan dan energy. Pemerintahan dianggap belum mampu mengelola dan memformalisan regulasi kebijakan dan menata baik kelembagaan. Penyebab kemiskinan di Provinsi Bengkulu antara lain faktor pendidikan yang memicu pengangguran, program pemerintah yang belum tepat sasaran, dan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Provinsi Bengkulu masuk ke dalam 10 besar tingkat korupsi tertinggi dari seluruh Provinsi se-Indonesia (Phrnews.id).

Disebutkan di laman Aclc.kpk.go.id, bahwa dampak korupsi adalah mandeknya perekonomian, serta rencana pembangunan kian terhambat. Dalam penelitian peneliti sebelumnya yang telah diprosidingkan, faktor faktor (eksternal & internal) yang mempengaruhi rasionalitas juga ditengarai oleh oligarki. Kondisi irrasional pemilih menyulitkan

pemimpin berkualitas memenangkan demokrasi electoral. Oligarki memahami kondisi mayoritas *voters* irrasional dengan melakukan sejumlah manuver berupa hoax/news false (post trusth effect), politik uang, popularitas kandidat, sistem *candidate buying*, *vote buying*, praktik suap badan penyelenggara dan pengawas pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka yang bersifat *candidate-centered politics* juga mendorong parpol merekrut pemilik modal besar dibanding kandidat dengan ikatan ideologi 4 struktur partai politik (Mkri.id).

Kondisi kondisi tersebut menjadi udara segar oligarki untuk meraih kursi kepemimpinan otomatis menenggelamkan calon pemimpin yang berkualitas. Kriteria utama legislator adalah kompetensi, integritas, kredibilitas, akuntabilitas, kualifikasi pendidikan, pengalaman organisasi, serta pemahaman akan politik yang baik. Legislator yang mumpuni diharapkan akan mampu mensejahterakan daerah dan rakyatnya. (Suri EW, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan study kasus (*Case Study*). Dalam menentukan informan pada penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu menggunakan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumentasi mengecek keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Upaya Mencetak Pemimpin yang *Primus Inter Pares* di Era Demokrasi Cacat (*Flawed Democracy*)

Sistem Rekrutimen dan Kaderisasi Partai Politik

Sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk arah dan karakteristik dari Parpol. yang baik. Pengelolaan partai yang baik untuk kepentingan masyarakat disebut dengan *Good Political Party Governance* mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, yang paham akan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan masyarakat.

Dengan kata lain, otonomi yang diberikan kepada parpol dalam rekrutmen Cakada tidak diiringi dengan ketentuan hukum yang jelas. Tidak hanya itu undang- undang pula tidak menguraikan denganrinci serta jelas tentang arti demokratis serta terbuka dalam proses rekrutmen serta cuma menyerahkan seluruhnya pada mekanisme internal parpol.

Parpol menafsirkan cocok dengan kepentingannya, mayoritas dicoba secara tertutup, tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif serta bisa sebeb- bebasnya dalam mengajukan cakada. disebutkan, partai politik harus membuat laporan keuangan setahun sekali buat dicoba audit serta dilaporkan secara publik. Tujuannya merupakan buat membenarkan kalau aliran dana partai politik bersih dari mungkin terdapatnya segelintir orang. Fakta kebanyakan di lapangan bahwa partai politik yang alih-alih

mengusung kandidat yang diinginkan publik justru memilih calon yang mewakili kepentingan elite.

Pengaruh Oligarki

Pendirian parpol dan berkontestasi dalam pemilu membutuhkan sumber daya yang besar sehingga lagi-lagi membuka pintu bagi oligarki untuk memberikan pengaruhnya. Syarat presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pemilu turut menghalangi kemunculan kekuatan alternatif. Untuk mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden, parpol harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR yang mengacu pada hasil pemilu lima tahun sebelumnya. Jika pun terdapat parpol baru yang hendak menyediakan opsi nonoligarkis, parpol tersebut perlu mendapat perolehan suara yang tinggi dan menunggu lima tahun terlebih dahulu.

Tak lupa bahwa selama lima tahun itu oligarki memiliki kesempatan untuk menghalangi parpol tersebut untuk berkontestasi dengan cara mengubah hukum yang berlaku. Dengan opsi kandidat yang tersedia, Pemilu 2024 akan tetap menghasilkan buah yang pahit bagi demokrasi. Tak perlu menaruh harapan berlebih kepada para kandidat. Perlu ada strategi yang lebih tajam untuk menghentikan pemilu yang oligarkis.

Rasionalitas Pemilih

Mayoritas pemilih di Indonesia masih dikategorikan pemilih irasional yang rentang akan politik uang, buzzer, framing media tak berimbang, hal ini disebabkan oleh mayortias rakyat Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Dalam penelitian peneliti

sebelumnya yang telah diprosidingkan, faktor factor (eksternal & internal) yang mempengaruhi rasionalitas juga ditenggarai oleh oligarki. Kondisi irrasional pemilih menyulitkan pemimpin berkualitas memenangkan demokrasi electoral. Faktor **Eksternal** berupa Terpaan *hoax/news false (post trusth effect)*, Politik Uang, Intimidasi, Popularitas kandidat, Sosialisasi/pendidikan politik, Peran Pemerintah, Format pemilu serentak, Sistem *Candidate buying*, Komitmen Penyelenggara Pemilu dan Lemahnya Hukum.

Sedangkan pada faktor interna lada Aspek-aspek kemasyarakatan seperti suku, agama, dan keberabatan, pragmatisme, Hubungan Moral dan Kekeabatan, Tingkat Intelektual, Level Ekonomi, Penguasaan teknologi/media, Ketertarikan akan politik, Demografi Faktor Eksternal berupa Terpaan *hoax/news false (post trusth effect)*, Politik.

Korupsi efek keberadaan Oligarki dalam Parpol

Di Indonesia, isu mengenai oligarki dalam partai politik telah menjadi pembahasan utama dalam politik dan pemerintahan. Oligarki merujuk pada dominasi politik dan ekonomi oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, yang signifikan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam partai politik. Keberadaan oligarki dalam partai politik tidak hanya mengancam prinsip demokrasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan praktik tindak pidana korupsi. Indonesia, sebagai negara demokratis yang sedang berkembang, masih menghadapi tantangan besar dalam

memerangi korupsi. Salah satu akar permasalahan korupsi yang perlu diperhatikan adalah dominasi oligarki dalam struktur partai politik. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oligarki cenderung merugikan kepentingan publik dan menghambat kemajuan pembangunan.

Keberadaan oligarki dalam partai politik di Indonesia memicu tindak pidana korupsi. Pertama, karena oligarki terpelihara dalam partai politik di Indonesia. Kedua, adanya dominasi oligarki terhadap proses pengambilan keputusan dalam partai politik; ketiga, terdapat hubungan antara oligarki dan tindak pidana korupsi, dengan banyaknya studi kasus yang relevan. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara oligarki dan korupsi dalam konteks partai politik di Indonesia, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil dalam memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi. Menurut Ridha (2020) ada beberapa cara oligarki dalam partai politik dapat memengaruhi tingkat korupsi :

1) Kontrol atas Sumber Daya Ekonomi: Oligarki seringkali memiliki kendali yang kuat atas sumber daya ekonomi suatu negara. Ini termasuk pengaruh mereka dalam proyek-proyek pemerintah, kontrak publik, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan partai politik sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas kontrol mereka, oligarki dapat menggunakan posisi dan pengaruh mereka untuk meraih keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi, seperti suap dan nepotisme dalam penunjukan kontrak. 2) Dominasi Politik:

Oligarki yang menguasai partai politik dapat menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka atau kepentingan pribadi. Melalui pengaruh mereka dalam proses legislasi, mereka bisa melemahkan aturan-aturan antikorupsi atau menghalangi penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka atau mitra bisnis mereka. 3) Ketidaktransparanan dalam Pendanaan Politik: Oligarki sering menjadi sumber utama pendanaan bagi partai politik. Terkadang, mereka menggunakan dana mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik atau memperoleh perlindungan politik dari pemerintah. Kekurangan transparansi dalam pendanaan politik bisa menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi, seperti pencucian uang atau suap, bisa terjadi tanpa terdeteksi. 4) Proses Pemilihan dan Penunjukan Pejabat: Oligarki sering memiliki kontrol terhadap proses pemilihan dan penunjukan pejabat di partai politik. Hal ini bisa menyebabkan penunjukan pejabat yang tidak kompeten atau korup dalam posisi kunci, yang meningkatkan risiko korupsi di dalam pemerintahan.

Formulasi Mencetak Pemimpin Primus Interpares

Perubahan Sistem Pemilu.

Memanglah, hendak terdapat kemampuan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam mekanisme pemilihan oleh DPRD, namun paling tidak pertumbuhan mutu demokrasi bisa terkendali dengan lebih baik. Walaupun

demikian, butuh pula terdapat mekanisme promosi untuk wilayah yang secara ekonomi serta kesejahteraan membaik buat bisa menyelenggarakan pilkada secara langsung.

Pembenahan Sistem Pembiayaan Politik Dan Kampanye

Kala caleg wajib membiayai kampanye politik mereka sendiri, mereka berpotensi besar meminjam modal atau meminta dukungan dana dari pihak ketiga dengan imbalan *clientelistic politics* (politik klientelisme). Secara teoritik, kemampuan terbentuknya klientelisme jadi terus menjadi membengkak di daerah-daerah yang mempunyai *extractive economies*, ekonomi yang berbasis pada sumber energi alam. Belum lagi “perlunya” modal buat politik duit.

Rasionalisasi Pemilihan.

Pada kesimpulannya, *trial and error* merupakan perihal yang lumrah dalam proses demokrasi. Lebih dari 25 tahun reformasi, kita butuh melaksanakan penilaian komprehensif terhadap sistem pemilu serta pembiayaan politik-kampanye. Masyarakat perlu didedukasi melalui Pendidikan politik yang ebanr yang melibatkan seluruh stake holder, mulai dari Lembaga penyelenggara pemilu, parpol, media, akademisi. Apabia Masyarakat rasional maka hasil piliha juga rasional, tiadakan politik uang akrena oligarki hanya mampu berkuasa di atas kemiskinan suara rakyat yang dibeli (*vote buying*).

Pembentukan Aturan Hukum penetapan Cakada.

Butuh dibangun peraturan hukum yang jadi bawah untuk

parpol ataupun gabungan parpol melaksanakan seleksi bakal calon kepala wilayah ditingkat partai politik. Paling tidak regulasi itu wajib mengendalikan tentang 1. Gimana system pilih (apakah memakai tata cara kesepakatan ataupun yang lain), 2. Siapa panitia seleksinya, 3. Gimana standart evaluasi (apakah memakai lembaga lain diluar partai), serta 4. Keharusan proses pilih dicoba secara demokratis serta terbuka yang jadi penyumbang dana ini dapat berefek ketergantungan partai pada pihak tersebut. Melalui pola mekanisme pemilu yang direformasi, berjenjang dan menghindari homogenitas sistem pemilu, Indonesia dapat menjadi negara demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang, bukan sekadar negara demokrasi dalam bingkai *electiontainment*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Formulasi atau langkah-langkah mencetak pemimpin yang *primus inter pares* di tengah kondisi demokrasi cacat (*Flawed Democracy*) dan faktor-faktor yang menghalangi lahirnya pemimpin yang *primus inter pares* dari proses demokrasi electoral dirumuskan aspek kajian dan permasalahan dalam mewujudkan calon pemimpin yang berkualitas yaitu pemasalahan parpol, oligarki, korupsi dan rasionalitas masyarakat. Dalam aspek parpol, partai yang baik untuk kepentingan masyarakat disebut dengan *Good Political Party Governance* mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, yang paham akan nilai-

nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan masyarakat.

Ketiga adalah **Rasionalitas Pemilih**. Mayoritas pemilih di Indonesia masih dikategorikan pemilih irasional yang rentan akan politik uang, *buzzer*, *framing* media tak berimbang, hal ini disebabkan oleh mayoritas rakyat Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Dalam penelitian peneliti sebelumnya yang telah diprosidingkan faktor faktor (eksternal & internal) yang mempengaruhi rasionalitas juga ditengarai oleh oligarki. Kondisi irrasional pemilih menyulitkan pemimpin berkualitas memenangkan demokrasi electoral. Faktor **Eksternal** berupa Terpaan *hoax/news false (post trusth effect)*, Politik Uang, Intimidasi, Popularitas kandidat, Sosialisasi/pendidikan politik, peran pemerintah, format pemilu serentak, Sistem *Candidate buying*, komitmen penyelenggara pemilu dan lemahnya hukum.

Sedangkan pada faktor interna lada Aspek-aspek kemasyarakatan seperti suku, agama, dan keberabatan, pragmatisme, hubungan moral dan kekerabatan, tingkat intelektual, level ekonomi, penguasaan teknologi/media, ketertarikan akan politik, demografi faktor eksternal berupa terpaan *hoax/news false (post trusth effect)*, politik. Dan terakhir **Korupsi efek keberadaan Oligarki dalam Parpol**. Oligarki merujuk pada dominasi politik dan ekonomi oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, yang signifikan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam partai politik.

Keberadaan oligarki dalam partai politik tidak hanya mengancam prinsip demokrasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan praktik tindak pidana korupsi. Salah satu akar permasalahan korupsi yang perlu diperhatikan adalah dominasi oligarki dalam struktur partai politik. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oligarki cenderung merugikan kepentingan publik dan menghambat kemajuan pembangunan.

Keberadaan oligarki dalam partai politik di Indonesia memicu tindak pidana korupsi. Maka dibutuhkan Formulasi Mencetak Pemimpin *Primus Interpares* agar tidak electoral dengan perubahan sistem pemilu, Mekanisme pemilihan, pembenahan sistem pembiayaan politik dan kampanye, Pembentukan aturan hukum penetapan Cakada.

Adapun saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Pendidikan politik pilih
2. Aturah hukum yang tegas
3. Peninjauan akan sistema pemilu
4. Perjuangan kaum intelektual akan demokrasi sehat
5. Jurnalis dna media yang bebas mesin propaganda pemerintah
6. Peniadaan buzzer pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Aclc.kpk.go.id. Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini.Jakarta;2022
- Hukumonline. Pemilu 2024 dan Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Oligarki. Jakarta;2022
- Idsejarah.net. Pengertian Primus Interpares [Internet]. Jakarta; 2018 March 19 [cit 2023 Apr 6]. Available from: <https://idsejarah.net/2018/03/apa-itu-primu-interpares.html>.

- Koho IR. Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Lensa. 2021 Mar 21;15(1):60-73.
- Kompas.com. Menata Ulang Demokrasi Indonesia dari Desa. Jakarta; 2022 September 2023
- Kompas.id. Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar. Jakarta; 2022 15 Februari. demokrasi-indonesia
- Mkri.id. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Tidak Sesuai Konstitusi. Jakarta; 2023:
- Muhlis M. Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. 2021 Mar 27;4(1):116- 41.